

STUDI POLA KOMUNIKASI PEMERINTAH DAN PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

STUDY OF PATTERNS OF COMMUNICATION GOVERNMENT AND THE BOARDING IN COMMUNITY DEVELOPMENT

Muhamad Fajar Pramono¹,

Dosen ISID/ Unida Gontor, Kepala LPPM UNIDA

[E-mail:isidmfpramono@yahoo.co.id](mailto:isidmfpramono@yahoo.co.id)

Abstract

Historical development of boarding school itself can not be separated from the history of the development of Islam in the archipelago. Even genealogy boarding school education system can be traced from the time before the advent of Islam in Indonesia. Along with the development program in Indonesia, with the character of independence, Pondok Pesantren experiencing rapid development. Pondok Pesantren is not only incarnated as an educational institution of the people, but also as agents of change and community development. With the enactment of Law No. 20 of 2003 on National Education System, Boarding School entered a new phase in the world of education in this country, Pondok Pesantren has entered an integral part in the national education system. If all this has been donating all its schools for the benefit of citizens (state), then there must be a symbiotic mutualism between the two. It's time the state (government) pay serious attention to the continuity of boarding. If all this can exist with non-boarding schools, then the existence will be maximized if it is supported by the state. Moreover, the challenges ahead are certainly more severe because the social dynamics are also increasingly complex. Therefore, the necessary revitalization of the relationship between schools and the government during this flow. Pesantren has thus become and always become "a pioneer or pioneer development in Indonesia. Of course this should be accompanied with awareness building attitude and professional behavior.

Keywords: Patterns of Communication, Government, Pesantren and Community Development

Abstrak

Sejarah perkembangan Pondok Pesantren itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Bahkan geneologi sistem pendidikan Pondok Pesantren dapat ditelusuri dari masa sebelum masuknya Islam di Indonesia. Seiring dengan program pembangunan di Indonesia,

dengan watak kemandiriannya, Pondok Pesantren mengalami perkembangan pesat. Pondok Pesantren tidak hanya menjelma sebagai lembaga pendidikan rakyat, tetapi juga sebagai agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Dengan lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pondok Pesantren memasuki babak baru dalam dunia pendidikan di negeri ini, Pondok Pesantren telah masuk bagian yang tak terpisahkan dalam Sistem Pendidikan nasional. Kalau selama ini pesantren telah menyumbangkan seluruh dayanya untuk kepentingan warga negara (negara), maka harus ada simbiosis mutualistik antara keduanya. Sudah waktunya negara (pemerintah) memberikan perhatian serius atas kelangsungan pesantren. Kalau selama ini pesantren bisa eksis dengan swadaya, maka eksistensi tersebut akan lebih maksimal apabila didukung oleh negara. Apalagi tantangan ke depan tentu lebih berat karena dinamika sosial juga semakin kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan revitalisasi relasi antara pesantren dan pemerintah yang selama ini berjalan apa adanya. Pesantren dengan demikian telah menjadi dan selalu menjadi "pelopor atau pioneer pembangunan di Indonesia. Tentu saja hal ini harus dibarengi dengan kesadaran membangun sikap dan perilaku profesional.

Kata Kunci: Pola Komunikasi, Pemerintah, Pesantren dan Pengembangan Masyarakat

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan Pondok Pesantren diakui sebagai sistem pendidikan tertua dan memiliki sejarah yang panjang di negeri ini. Sejarah perkembangan Pondok Pesantren itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Bahkan geneologi sistem pendidikan Pondok Pesantren dapat ditelusuri dari masa sebelum masuknya Islam di Indonesia. Hal senada, sebagaimana diungkapkan oleh Manfred Ziemek (1986) bahwa pada mulanya banyak pesantren dibangun sebagai pusat reproduksi spiritual, yakni tumbuh berdasarkan sistem-sistem nilai yang bersifat Jawa, tapi para

pendukungnya tidak hanya semata-mata menanggulangi isi pendidikan agama saja.

Pesantren bersama - sama dengan para muridnya (santri) atau dengan kelompoknya yang akrab mencoba melaksanakan gaya hidup yang menghubungkan kerja dan pendidikan serta membina lingkungan desa berdasarkan struktur budaya sosial. Karena itu pesantren mampu menyesuaikan diri dengan bentuk masyarakat yang amat berbeda maupun dengan kegiatan-kegiatan individu yang beraneka-ragam. Akhirnya pesantrenlah yang hampir semata-mata merupakan basis terbuka bagi penduduk desa demi terlaksananya swadaya dalam

bidang sosial, budaya dan perekonomian².

Karena itulah, dalam perjalanan sejarah keindonesiaan, pesantren tidak pernah lekang oleh waktu, bahkan secara kuantitas terus mengalami kenaikan (Rahim : 146). Karena itu masyarakat pesantren sejak awal merupakan komposisi besar kelompok sosial budaya di Indonesia. Hal itu sebagaimana *Geertz* membagi kategori sosial masyarakat Jawa menjadi santri, priyayi dan abangan, walaupun pilahan sosial ini dewasa ini semakin absurd. Selama ini kelompok santri yang terlembagakan dalam masyarakat pesantren identik dengan masyarakat tradisional. Berbeda dengan masyarakat modern, masyarakat tradisional merupakan kelompok terbesar dalam pelapisan sosial di Indonesia.

Memasuki era kolonial, Pondok Pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan rakyat yang berkembang di masyarakat selain di surau-surau dan langgar-langgar. Barulah pada dasawarsa terakhir abad ke-19, Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan sistem Pendidikan Nasional. Inipun hanya diperuntukkan bagi sekelompok kecil masyarakat, terutama

kalangan ningrat. Demografisnya yang kebanyakan berada di wilayah pinggiran serta doktrin jihad yang kuat untuk melawan penjajah, menjadikan Pondok Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan rakyat tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial³.

Sementara dalam era Pemerintah Orde Baru tekanan kepada pesantren sebagai basis pembetulan santri pejuang pembangunan, distigmakan secara lembaga. Proses sekulerisasi pendidikan nasional diberlakukan dan diskriminasi terhadap pendidikan agama terjadi. Tujuannya, agar kaum santri terpelajar dalam bidang agama tak dikembangkan diri dalam dunia akademis, agar "rongrongan" terhadap negara terminimalisasi.

Seiring dengan program pembangunan di Indonesia, dengan watak kemandiriannya, Pondok Pesantren mengalami perkembangan pesat. Pondok Pesantren tidak hanya menjelma sebagai lembaga pendidikan rakyat, tetapi juga sebagai agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Dengan lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pondok Pesantren memasuki babak

baru dalam dunia pendidikan di negeri ini, Pondok Pesantren telah masuk bagian yang tak terpisahkan dalam Sistem Pendidikan nasional.

Fakta ini memperlihatkan fenomena kian sadarnya masyarakat Indonesia bahwa kesan buruk yang disematkan kepada santri maupun pesantren, tak lagi "laku". Juga membuktikan bukti bahwa apresiasi dan penerimaan masyarakat terhadap pendidikan pesantren yang mampu menghasilkan santri generasi pejuang dan pembangunan bangsa. Menurut Hamid Fahmy, pakar pemikiran Islam, bahwa semestinya kini tak perlu lagi mempertanyakan apa peran dan fungsi pesantren dalam pembangunan negara ini. Yang justru perlu dipertanyakan adalah apa yang telah dilakukan Pemerintah dalam membangun pesantren dan apa yang belum.⁴

Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang sangat mengakar di masyarakat. Sebagai lembaga yang telah mengakar dan telah menjadi bagian sosiokultural masyarakat, pesantren memiliki peluang sebagai salah satu penggerak pembangunan. Sebagian besar pesantren berada di daerah pedesaan sehingga potensi

pertanian menjadi salah satu alternatif kegiatan pemberdayaan ekonomi pesantren. Konsep pengembangan pertanian yang dilakukan di pesantren sudah seharusnya menggunakan pendekatan agribisnis. Sebagai suatu sistem, agribisnis akan memberikan nilai tambah melalui kegiatan-kegiatan subsistem yang ada di dalamnya.

Landasan kultural yang ditanamkan kuat di pesantren diharapkan menjadi *guidence* dalam implementasi berbagai tugas baik pada ranah sosial, ekonomi, hukum, maupun politik baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Ini penting karena pesantren merupakan kawah candradimuka bagi munculnya *agent of social change*. Dan negara sangat berkepentingan atas tumbuhnya generasi yang mumpuni dan berkualitas. Oleh sebab itu, kepedulian dan perhatian negara bagi perkembangan pesantren sangat diperlukan.

Kalau selama ini pesantren telah menyumbangkan seluruh dayanya untuk kepentingan warga negara (negara), maka harus ada simbiosis mutualistis antara keduanya. Sudah waktunya negara (pemerintah) memberikan perhatian

serius atas kelangsungan pesantren. Kalau selama ini pesantren bisa eksis dengan swadaya, maka eksistensi tersebut akan lebih maksimal apabila didukung oleh negara. Apalagi tantangan ke depan tentu lebih berat karena dinamika sosial juga semakin kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan revitalisasi relasi antara pesantren dan pemerintah yang selama ini berjalan apa adanya.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pembangunan

Sejak puluhan tahun lalu konsep pembangunan selalu menjadi perdebatan, yang pada gilirannya mengalami perubahan-perubahan. Pada era pasca kolonial berakhir Perang Dunia II, konsep pembangunan didominasi oleh perspektif ekonomi. Para ekonom dalam dasawarsa 1950-an lebih banyak memperdebatkan konsep ini berdasarkan pada lingkup keilmuannya, dimana industrialisasi dianggap sebagai hal hakiki dalam pertumbuhan (Suwarsono, 1991: hal. 7)

Pendekatan yang dilaksanakan adalah merangsang pertumbuhan sektor industri, sedangkan sektor tradisional kurang mendapatkan perhatian. Pendekatan ini jelas mengedepankan modernitas yang berimplikasi pada investasi yang

besar pada tahap awal pembangunan dan kesulitan penerapan modernitas pada mayoritas kebudayaan tradisional pada saat itu. Persepektif ini selanjutnya mendapatkan kritikan karena ketimpangan sosial yang terjadi.

Perkembangan lain muncul ketika "ekonomi politik" menjadi berpengaruh pada akhir 1960-an dan 1970-an. Inti pemikirannya adalah masalah ekonomi hanya dapat dipahami dalam konteks realitas politik. Ahli ekonomi politik berangkat dari anggapan bahwa masalah-masalah politik, kepemilikan sumber daya, kekuasaan dan distribusi berpengaruh besar terhadap proses pembangunan. Untuk selanjutnya konsep pembangunan bergeser pada konsep ketergantungan yang bertumpu pada negara-negara maju.

Dari setiap perspektif pembangunan tersebut muncul konsepsi baru yang lebih luas, yang tidak hanya mencakup pertumbuhan, melainkan juga kapasitas, keadilan dan penumbuhan kuasa serta wewenang. Konsepsi baru tersebut berimplikasi pada bergesernya paradigma dalam menentukan masa depannya sendiri. Partisipasi masyarakat diperlukan mulai dari identifikasi kebutuhan

sampai pada proses evakuasi. Keberhasilan proses pembangunan semacam ini sangat terkait dengan pola komunikasi yang dilakukan dalam prosesnya. Dalam hal ini yang berperan adalah para pelakunya, baik dari pemerintah, para agen perubahan, maupun masyarakat sendiri (Everett M. Rogers, 1989: hal. 2)

2. Konsep Komunikasi

Studi komunikasi dewasa ini telah banyak melahirkan berbagai macam teori yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Ada banyak teori tentang komunikasi. Berdasarkan kurun waktu dan pemahaman atas makna komunikasi, teori komunikasi semakin hari berkembang seiring berkembangnya teknologi informasi yang memakai komunikasi sebagai fokus kajiannya. Teori komunikasi kontemporer yang merupakan perkembangan dari teori komunikasi klasik melihat fenomena komunikasi tidak fragmatis. Artinya, komunikasi dipandang sebagai sesuatu yang kompleks-tidak sederhana yang dipahami dalam teori komunikasi klasik (Totok Mardikato, 1997: hal. 27).

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator pada sasaran dengan tujuan makna yang sama. Ada tiga kopseptualisasi yang dikemukakan oleh John R. Wenburg dan William W. Wilmot, juga Kennet K. Sereno dan Edward M. Bodaken, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi⁵.

Komunikasi yang dikonsepsikan sebagai "tindakan satu arah" dianggap merupakan suatu proses linier yang dimulai dengan sumber atau pengirim, komunikator dan berakhir pada penerima, sasaran dan tujuannya. Hanya saja, kerangka pemahaman ini kurang sesuai jika diterapkan untuk komunikasi tatap muka, namun mungkin ini tidak keliru jika diterapkan pada komunikasi level publik (pidato) yang tidak melibatkan tanya jawab dan sisi komunikasi massa (cetak-elektronik) (Mardikanto, 1997: hal. 148)

Oleh Michael Burgoon⁶ "komunikasi satu arah" disebut sebagai "definisi berorientasi sumber", (*source-oriented definition*). Definisi ini menyiratkan komunikasi sebagai kegiatan secara

sengaja dilakukan seseorang menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. Dalam konteks komunikasi dianggap suatu tindakan yang disengaja (*intentional act*) untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator. Konsep ini mengabaikan komunikasi yang tidak disengaja, seperti pesan yang tidak direncanakan yang tersirat dalam nada suara atau ekspresi wajah, atau isyarat lain yang spontan. Selain itu, komunikasi satu arah juga mengabaikan pengaruh timbal balik antara pembicara dan pendengar.

Konsep kedua adalah interaksi menyertakan komunikasi sebagai "proses sebab-akibat" atau "aksi-reaksi", yang arahnya bergantian. Konsep kedua ini dipandang lebih dinamis dari yang pertama. Namun masih menganggap para peserta komunikasi berorientasi pengirim dan penerima pesan, karena itu masih berorientasi sumber walaupun secara bergantian. Sehingga proses interaksi yang berlangsung masih bersifat mekanisme statis (B. Aubrey Fisher, 1978: hal. 228).

Komunikasi sebagai "transaksi" ini, yang merupakan konsep ketiga diartikan sebagai suatu proses personal, karena makna atau

pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Penafsiran terhadap pesan verbal atau non-verbal terhadap orang lain yang disampaikan pada gilirannya akan mengubah penafsiran orang lain yang akan berganti pula seterusnya. Karena, pada konsep ini komunikasi lebih dinamis dan tidak membatasi yang disengaja atau respon yang diamati saja. Pada konsep ini komunikasi dianggap telah berlangsung apabila seseorang telah menafsirkan orang perilaku orang lain, baik verbal maupun non-verbalnya. Menurut Burgoon, konsep ketiga ini mirip "definisi" berorientasi penerima (*Receiver-Oriented definition*).

3. Konsep Komunikasi Pembangunan

Selain tiga kerangka pemahaman tersebut, komunikasi sebenarnya tidak lepas dari konteks-konteks, model dan pola. Karena proses komunikasi tidak berlangsung dalam suatu ruang hampa-sosial. Pertama, konteks fisik, dimana proses komunikasi berlangsung dalam ruang situasi, iklim, udara, penataan dinding, warna dan lainnya. Kedua, konteks psikologi, yaitu situasi psikologis para peserta komunikasi, seperti, sikap, emosi,

prasangka dan lainnya. Ketiga, konteks sosial, seperti, norma kelompok, nilai sosial dan karakteristik budaya. Keempat, konteks waktu yang terkait dengan komunikasi berlangsung.

Sedangkan dalam hal fungsi, terdapat tiga fungsi modal: pelukisan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menentukan-memperbaiki kemacetan sebuah komunikasi. Penentuan suatu model komunikasi yang dilakukan dalam komunikasi pembangunan misalnya sangat penting artinya untuk tercapainya tujuan dan target pembangunan yang diinginkan.

Dari hal tersebut diatas, komunikasi pembangunan dapat dikatakan sebagai komunikasi yang dirancang, dan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan dengan tujuan untuk mendorong partisipasi aktif para pelaku pembangunan. Partisipasi aktif dalam pembangunan itu meliputi: identifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki, penyusunan rencana, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, kaderisasi dan pemanfaatan hasil pembangunan (Totok Mardikaton, 1997: hal. 25).

Karya Rostow *The Stages of Economic Growth a non Communist*

Manifesto (1960) sangat berpengaruh pada saat itu. Para ahli komunikasi pembangunan pada saat itu dapat menerima pemikiran tersebut. Karya-karya Schramm (1964), Lerner (1958), Lerner dan Schramm (1967) serta Pye (1963) berpengaruh besar dalam penguasaan pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa media massa dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan (Suwarsono, 1991: hal 16).

Menurut Dissayanke, pendekatan model pertama di atas disamping mengandung filsafat pembangunan tertentu, juga terdapat filsafat komunikasi yang mendasarinya. Pengaruh model Aristoteles sangat kuat, yaitu empat komponen komunikasi: komunikator, pesan, penerima dan tujuan. Penekannya ada pada komunikator (media massa), dan sedangkan penerima serta struktur sosialoginya hanya mendapat sedikit perhatian.

Pendekatan kedua, para ahli komunikasi terdorong untuk membuat strategi baru. Dengan didasarkan pada pengalaman dengan pendekatan pertama, mereka berusaha menjawab permasalahan ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan, ide-ide kemandirian

(*self-reliance*), pengelolaan sendiri (*self-management*), pembangunan sendiri (*self-development*) dan partisipasi rakyat. Juga untuk menjawab masalah-masalah yang itu tidak terjawab pada pendekatan pertama, seperti penerapan media yang lebih purposif.

Pada pendekatan kedua ini terjadi pergeseran model komunikasi yang semula: dari model linier, mekanistik dan dari satu arah, beranjak pada model-model yang berorientasi pada proses (*process oriented*) yang dua arah. Dengan munculnya tulisan-tulisan Serlo (1969, 1979) dan Sarlund (1970), komunikasi kemudian lebih dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, di mana komunikator dan khalayak mempunyai tanggung-jawab yang sederajat.

Pendekatan kedua ini belum sepe-nuhnya menjelaskan peranan komunikasi pembangunan, karena baru sampai pada perpaduan media komunikasi modern dengan tradisional, untuk menciptakan suatu proses komunikasi yang timbal balik antara pembuat kebijakan dengan publik. Pendekatan ini merupakan perintis jalan bagi evolusi model komunikasi pem-bangunan⁷.

Pendekatan keempat, ditandai dengan penekanan eksplisit untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri (*self reliance*), melalui strategi pemaduan ide - ide; memaksimalkan partisipasi masyarakat paling bawah (*grassroot level*), pembangunan desa secara terpadu, penggunaan teknologi tepat guna (*appropriate technology*) dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pendekatan-pendekatan di atas, dari satu kurun waktu berikutnya tampak bahwa komunikasi mengalami pergeseran konsep dan mencoba menyesuaikan dengan konsep pembangunan saat itu. Kebanyakan dari pendekatan tersebut masih menekankan pada media-centric lebih menekankan pada media dan pesan yang disampaikan melalui media apa. Kekurangan dalam pendekatan sepihat itu dicoba untuk diperbaiki oleh Rogers dan Akhikarya (1978) dengan merumuskan pendekatan konvergensi yang didasarkan pada model komunikasi sirkuler, yang menggantikan pendekatan linier.

Cara atau strategi Rogers dan Adhikarya tersebut, tepat untuk pembangunan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri, sebagaimana paradigma

pembangunan yang terlibat ini sedang digulirkan oleh pemerintah Indonesia. Pola komunikasi dalam proses pembangunan, merupakan pola yang juga melibatkan LSM. Mereka adalah para pelaku pembangunan yang pola komunikasinya dalam proses pembangunan turut menentukan berhasil tidaknya pembangunan yang telah direncanakan (h. 143).

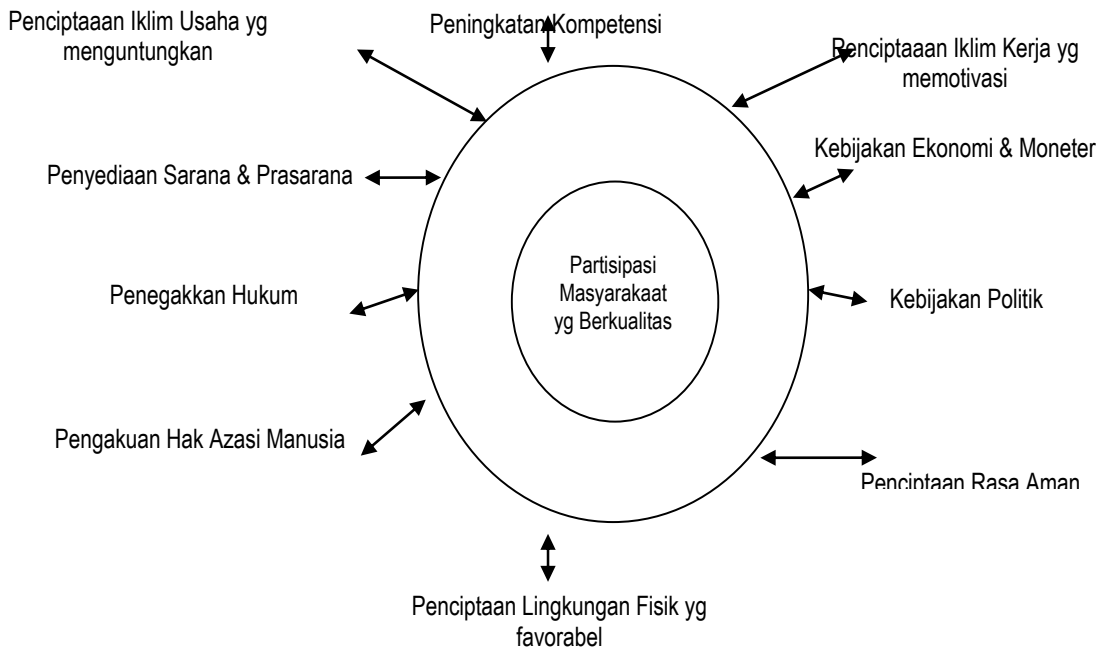
Dengan demikian ada keterkaitan penting antara komunikasi dengan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan. Ada beberapa pemikiran yang mengaitkan kedua komponen tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Schramm dan Dube, yakni:

- 1) Komunikasi berfungsi untuk menciptakan iklim agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
- 2) Komunikasi adalah mekanisme untuk mobilisasi (*a mobilization mechanism*).

- 3) Komunikasi berperan untuk menyediakan: Informasi tentang kebutuhan akan perubahan, Informasi tentang kebutuhan akan perubahan, Informasi tentang perubahan yang akan terjadi, Informasi tentang alternatif-alternatif yang tersedia, Informasi tentang metode, alat, keuntungan mengadopsi ide baru dan cara untuk mengerjakan sesuatu. Komunikasi pembangunan merupakan komunikasi yang dirancang sebagai bagian dari kegiatan pembangunan dengan tujuan untuk mendorong partisipasi aktif para pelaku pembangunan tersebut. Partisipasi aktif dalam pembangunan meliputi identifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki; penyusunan rencana; pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi; kaderisasi dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Pola Komunikasi, Pemerintah, Pesantren dan,,, Fajar Pramono

Mengenei peran dan fungsi komunikasi dalam pembangunan dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1: Peran dan Fungsi Komunikasi Dalam Pembangunan

4. Pola Komunikasi Dalam PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pengembangan masyarakat atau sering disebut *Community Development* (CD) dalam pembangunan merupakan model atau alternatif yang dapat memecahkan masalah kemiskinan yang terjawab oleh penerapan paradigma modernisasi. Sasaran utama CD adalah menolong masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Hasil akhir dari CD adalah terciptanya masyarakat yang mendorong dirinya sendiri dan

sustainable economic growth dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. CD dapat dipahami pula sebagai usaha-usaha kelompok orang dalam sebuah lokalitas untuk menciptakan sebuah proses sosial kolektif dalam memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan mereka. Dalam bahasa sehari-hari, model ini biasa disebut dengan "pemberdayaan masyarakat lokal".

Ada beberapa karakteristik pendekatan *Community Development* (CD) yang juga merupakan

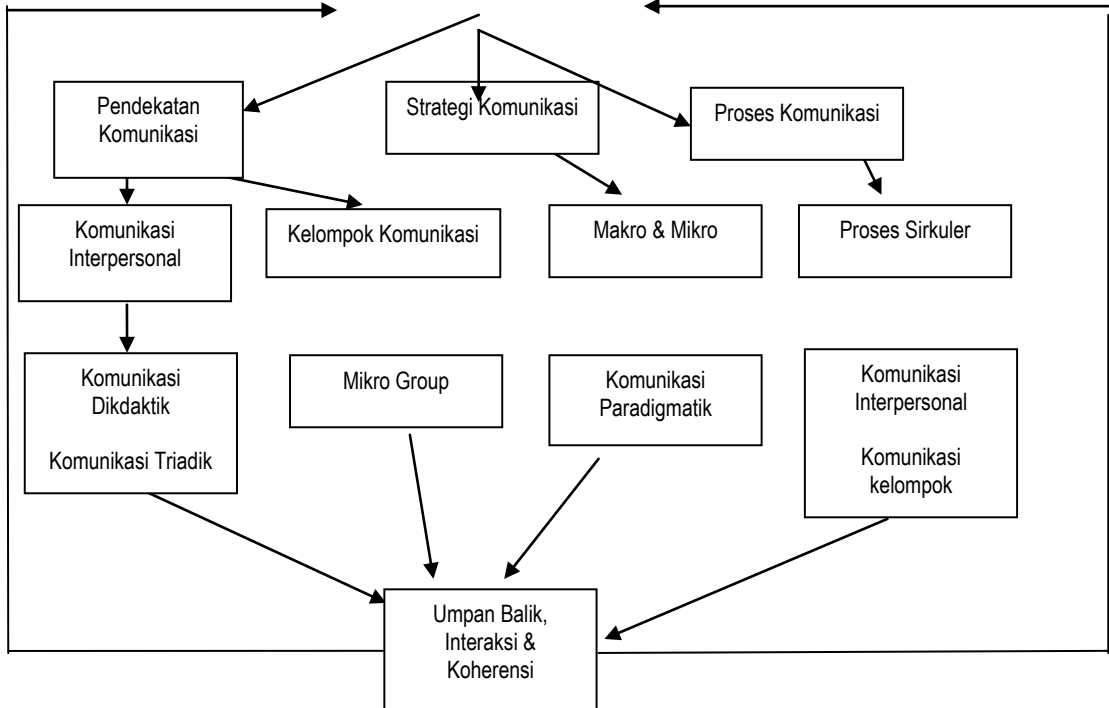
acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan, yaitu: berkelanjutan (sustainable), pemberdayaan (empowerment); efektif dan efisien untuk masyarakat lokal; demokratis dan partisipatif; distribusi hasil dan manfaat yang lebih merata dalam masyarakat lokal, keterkaitan kelembagaan intra dan ekstra; tidak merugikan atau mengecam budaya lokal; dan peka terhadap masalah gender (wanita dimasukkan sebagai stakeholder) (Jim Ife & Frank Teseriero, 2008: hal. 285).

Pola komunikasi pembangunan dalam kajian ini adalah bentuk atau model komunikasi yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Dalam pembangunan yang menggunakan strategi pengembangan masyarakat atau *Community Development* (CD), pelaku pembangunan bukan hanya pemerintah, karena partisipasi aktif masyarakat setempat yang diperlukan. Sehingga pembangunan banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan didorong para pelaku perubahan. Pemerintah selaku regulator, fasilitator dan dinamisator mem-

bantu dalam pengambilan kebijakan secara makro. Sedangkan kebijakan mikro dilakukan oleh para pelaku pembangunan lokal. Masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama agen perubahan, baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lainnya dan pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan perlu suatu pola komunikasi yang tepat agar target pembangunan yang diharapkan bisa tercapai (Mardikanto, 1997: hal. 16).

Proses komunikasi pada pembangunan yang didasarkan partisipasi aktif masyarakat harus didasarkan pada kondisi dan kultur setempat, sehingga para agen pembangunan sebagai motivator banyak bergerak dalam tataran interpersonal *communication* atau komunikasi antar pribadi. Hal ini disebabkan pendekatan komunikasi interpersonal ini lebih mampu mengetahui aspirasi masyarakat tentang kebutuhan-kebutuhannya karena sifatnya *feedback*-nya yang langsung. Sebagai ilustrasi bisa dilihat gambar berikut:

Pola Komunikasi, Pemerintah, Pesantren dan,,, Fajar Pramono



Gambar 2: Skema Pola Komunikasi Dalam Pengembangan Masyarakat dan Agen Pembangunan

5. Pemerintah, Pesantren dan Pengembangan Masyarakat

Dari diskusi tentang karakteristik pesantren dan unsur-unsur kunci yang menentukan proses pembelajaran didalamnya, pesantren dipandang memiliki *grounded nature* dan pranata sosial yang tangguh dan mewakili aspirasi sebagian besar masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pesantren dipandang sangat potensial untuk berperan sebagai basis pembangunan wilayah yang strategis. Contoh pesantren yang berhasil memberikan dampak pembangunan terhadap masyarakat lokal di

sekitarnya antara lain Pesantren Daarut Tauhid pimpinan KH Abdullah Gymnastiar di Bandung, Pesantren Agrobisnis Al-Ittifaq di Ciwidey, Pesantren Al-Amanah dengan peternakan ayam dan ikannya di Cililin (Dodi Nandika, 2005).

Hal yang sama dilakukan Pondok Pesantren Maslakul Huda, sebuah pesantren salaf yang berdiri di Desa Kajen, Pati, Jawa Tengah. Pesantren yang diasuh KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh atau akrab disapa Kiai Sahal ini telah memberi kontribusi positif dan signifikan terhadap persoalan-

persoalan sosial masyarakatnya. Di antara keberhasilan Kiai Sahal dan komunitas pesantrennya dalam memberdayakan masyarakat adalah dengan mendirikan dan mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi yang beraset puluhan miliar rupiah, Unit Simpan-Pinjam Syari'ah (USPS), beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) binaan, pembuatan pakan ternak dari limbah tapioka, dan masih banyak lagi usaha sosial lainnya (Zubeidi, 2007).

Paradigma pesantren tampaknya sangat didominasi oleh karakteristiknya yang sangat dekat dengan masyarakat. Pada saat kultur pesantren ditarik pada tataran formal, ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, pesantren mampu melakukan modernisasi di lingkungan masyarakatnya. Kedua, pesantren berubah menjadi institusi pendidikan formal yang terpisah dari kultur masyarakatnya. Kemungkinan yang kedua terjadi karena grounded nature pesantren terlepas dari akar masyarakatnya, sehingga pesantren berubah menjadi sekolah formal biasa.

Dari ketiga contoh pesantren tersebut di atas menunjukkan bahwa diversifikasi program dan kegiatan *life skills* di pesantren makin terbuka

dan luas, jika mampu melakukan penggalangan sumber daya masyarakat sekitarnya dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat (Hasbullah, 1999). Oleh karena itu, seiring dengan kuatnya modernisasi pondok pesantren, maka rekonstruksi peran pondok pesantren yang tadinya hanya mempelajari kitab-kitab Islam klasik kiranya dapat diberdayakan secara maksimal sebagai agen dalam pembangunan wilayah (Dodi Nandika, 2005).

Melalui pendekatan ini, sumber daya atau unsur-unsur pondok pesantren termasuk kiai / guru, masjid, santri, pondok, kitab-kitab klasik hingga ilmu pengetahuan yang baru dapat didayagunakan dalam proses pendidikan *life skills* secara berkelanjutan untuk membangun manusia yang memiliki pemahaman ilmu pengetahuan, potensi kemasyarakatan, dan pembangunan wilayah. Hal ini berujung pada penciptaan sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif. Dengan demikian, pondok pesantren tidak hanya menjadi penempa nilai-nilai spiritual saja, tetapi juga mampu meningkatkan kecerdasan sosial, dan keterampilan dalam membangun wilayahnya.

Pola Komunikasi, Pemerintah, Pesantren dan,,, Fajar Pramono

Pengembangan program dan kegiatan pesantren agar berperan sebagai basis pembangunan wilayah pada dasarnya dimulai dari kemampuan pesantren tersebut untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada di lingkungannya oleh sumber daya manusia yang ada di pesantren. Sumber daya manusia pesantren diberikan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya, sehingga dapat berperan sebagai driving force masyarakatnya. Dengan demikian, program dan kegiatan life skills yang dikembangkan pada pesantren sebagai institusi pendidikan berasal dan dipelajari dari lingkungan masyarakatnya, serta tumbuh dan berkembang secara bottom-up, dan bukan ditentukan terlebih dahulu sebagai ekspektasi formal suatu kurikulum persekolahan.

Oleh karenanya, pembangunan pendidikan di kalangan pesantren memerlukan keterlibatan elemen masyarakat sekitar dan pemerintah daerah (pemda), baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Dalam upaya mencari model yang tepat agar peran pondok pesantren dalam pembangunan wilayah berjalan efektif, pemda perlu merangkul perguruan tinggi sebagai

mitra. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi memiliki sumber daya yang memadai dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan riset.

Model yang akan dikembangkan paling tidak memiliki beberapa komponen bantuan berikut: Pertama, pemberian dana atau modal bergulir atau ventura yang dikaitkan dengan pengembangan potensi wilayah; Kedua, pendampingan tenaga ahli dari perguruan tinggi; pendampingan tenaga ahli di sini meliputi transfer teknologi dari perguruan tinggi ke pesantren, yang mencakup sumber, buku-buku atau media tulis pendukung lainnya; Ketiga, penggunaan Information Communication Technology (ICT) untuk mendukung kegiatan dan akses informasi; Keempat, pengadaan dan pengembangan teknologi atau peralatan produksi untuk meningkatkan potensi lokal.

Kerjasama Terinspirasi oleh model *land grant college* yang berhasil melakukan modernisasi pertanian di India dan Amerika Serikat beberapa dekade yang lalu, pemda harus bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan lingkungan masyarakat di sekitar pesantren sebagai inkubator pengembangan program - program

pembangunan masyarakat yang sesuai dengan potensi wilayah setempat.

Secara sederhana sumber daya ekonomi masyarakat pesantren dapat dipilah menjadi dua, yaitu modal dan tenaga kerja yang keduanya bersifat tangible (Rahardjo, 1999 : 337). Modal mencakup uang, tanah/sumber daya alam, bangunan, mesin atau peralatan yang dimiliki oleh masyarakat pesantren, sedangkan tenaga kerja merupakan faktor produksi sesudah modal yang kadang disebut dengan modal insani (human capital). Modal insani memegang peran yang teramat vital dalam faktor produksi, karenanya dikenal human investmen dengan harapan mendapatkan modal insani yang berkualitas (Rahardjo, 1999 : 335). Ketersediaan faktor modal tidak menjamin suksesnya pengembangan ekonomi bila tidak diiringi dengan kualitas SDM. Contoh konkrit dalam hal ini adalah Indonesia di satu sisi dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan di sisi yang lain.

Kualitas sumber daya manusia tidak selalu tercermin dalam ketrampilan dan fisik manusia akan tetapi juga pendidikan, kadar pengetahuan, pengalaman /

kematangan dan sikap atau nilai-nilai yang dimiliki. Berkaitan dengan unsur yang terakhir, pakar ekonomi memandang pentingnya "etos" dari *human capital*. Etos dalam pengertian sosiologis adalah "sekumpulan ciri-ciri budaya, yang dengannya suatu kelompok membedakan dirinya dan menunjukkan jati dirinya berbeda dengan kelompok yang lain".

Anggota masyarakat dengan bantuan para santri pesantren yang telah memperoleh alih teknologi dari perguruan tinggi, menentukan paket-paket program yang akan dipilih. Paket-paket tersebut dapat berupa usaha warung serba ada (waserda), ternak ikan, pembibitan kelapa hibrida, usaha fotokopi dan penjilidan, atau jenis usaha atau pekerjaan apa saja yang sesuai dengan potensi wilayah setempat. Akuntabilitas program kelak dapat dilihat dalam tiga tahap. Pertama, keberhasilan alih teknologi dari perguruan tinggi ke pesantren sebagai institusi sehingga pesantren dan santri-santrinya mampu berperan menjadi motor penggerak pertumbuhan usaha dan lapangan kerja yang ada di lingkungan masyarakatnya. Kedua, keberlanjutan program dan dampaknya terhadap pertumbuhan lapangan

usaha dan pekerjaan di lingkungan masyarakat tersebut, pasca penghentian bantuan dari pemda dan perguruan tinggi, Ketiga, peningkatan sumber daya manusia masyarakat setempat dalam mengelola lapangan usaha baru.

Yang patut menjadi catatan adalah, model ini tidak bisa diberlakukan secara umum dan dijadikan obat generik untuk semua pesantren di Indonesia. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya pembangunan pondok pesantren sangat dipengaruhi oleh kultur lokal yang melekat dengan perilaku dan kemampuan para santrinya sebagai potential driving force, serta kejelian seorang pimpinan pesantren untuk melihat peluang-peluang yang ada di dalam masyarakatnya. Akankah keunggulan institusi pesantren ini menjadi perhatian pemerintah dalam membangun wilayahnya ? Kenapa tidak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas bahwa selama ini telah terbukti tanggung menghadapi berbagai tantangan karena kuatnya nilai-nilai agama yang dijadikan pijakan dan prinsip kemandirian. Dalam hal ini pengembangan ekonomi adalah bisa memiliki jiwa dan semangat kewira-

usaha (enterprenurship) yang menjadi signifikan dan strategis bagi pengembangan masyarakat.

Pesantren dengan demikian telah menjadi dan selalu menjadi "pelopor atau pioneer pembangunan di Indonesia. Tentu saja hal ini harus diberengi dengan kesadaran membangun sikap dan perilaku profesional.

Berpijak dari pemikiran dan fakta di lapangan seperti yang dijelaskan, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan pesantren dalam kapasitas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator pemberdayaan atau pengembangan masyarakat (*Civil Empowerment and Community Development*), sebagai berikut:

Pertama, tantangan terberat pesantren adalah dengan mencegah terjadinya aliansi modal simbolik (Otoritas Religius), modal kultural (Intensitas) dan modal ekonomi yang berpotensi diselewengkan oleh kelompok kepentingan (interest group) tertentu.

Kedua, sebagai lembaga yang dekat dan dipercaya oleh masyarakat, pesantren hendaknya melakukan program kerja pemberdayaan masyarakat, menuju terciptanya "kedewasaan" masyara-

kat, sejajar dengan masyarakat lainnya.

Ketiga, dalam bidang perekonomian pesantren perlu melakukan kegiatan produktif ekonomis yang berbasis pada sumber daya lokal. Upaya ini mendesak dilakukan segera membebaskan masyarakat sekitar pesantren dari jeratan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim, Rr. Suhartini, M. Choirul Arif, A. Sunarto (eds) (Juli 2005). *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, Cet. I.
- Arief, Sritua. (1998). *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Ballling dan Totten, (1985). *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*, Jakarta : Rajawali Press, 1985, cet II
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Dodi Nandika, "Pesantren Sebagai Basis Pembangunan Wilayah", dalam *Republika*, Jum'at, 25 Februari 2005.
- Effendi, Tadjudin Noer. (1998). *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Field, John (Maret 2010). *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana, Cet. I.
- Fisher, B. Aubrey. (1986). *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- H.J. de Graaf dan Th. G. Th. Pigeaud. *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa- Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16*. Jakarta: Grafiti Press, 1986.
- Hamka, (1981). *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. IV.
- Jim Ife dan Frank Tesoriero. (September 2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I.
- Karim, M. Rusli. *Dinamika Islam di Indonesia Suatu Tinjauan Sosial Politik*. Yogyakarta: Hanindita, 1985.
- Korten, David C. (1989). *Getting to The 21st Century Voluntary Action and the Global Agenda*. Connecticut, USA: Kumarian Press, Inc.
- Litlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss. (2008). *Theories of*

Pola Komunikasi, Pemerintah, Pesantren dan,, Fajar Pramono

- Human Communication.*
Belmont, USA: Pre-Press
Company, Inc, Ninth Edition.
- Mardikanto, Totok. (1997). *Dasar-dasar Komunikasi Pembangunan.* Jakarta: Balai Pustaka, Cet I.
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial: Perpektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Ditperta Depag RI.
- Nasution, Z. 2004. *Komunikasi Pembangunan. Pengenalan Teori dan Penerapannya.* Rajawali Pers. Jakarta.
- Panitia PM Gontor. *K.H. Imam Zarkazy Dari Gontor Merintis Pesantren Modern.* Ponorogo: Gontor Press, 1996.
- Pembangunan Indonesia : *Menyongsong Abad XXI.* Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.
- Rogers, E. M (Ed). 1989, *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis.* LP3S. Jakarta.
- Rogers, E. M. 2003, *Diffusion of Innovations: Fifth Edition.* Free Press. New York.
- Rovihandono, Rio, dkk (Januari 2006). *Merekam jejak Mitra Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat.* Jakarta: Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Cet. I.
- Suman, Agus dan Ahmad Erani Yustika. (1997). *Perspektif Baru Pembangunan Indonesia catatan Kritis terhadap Isu-Isu Aktual,* Malang: Brawijaya Press, cet. I.
- Suwarsono & Alvin Y. So (1991), *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia – Teori-teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia,* Jakarta: LP3ES, Cet. 1 (Selasa, 2 Nopember 2010).
- Tilaar, H.A.R, (1997), *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi.* Jakarta: Gramedia.
- Yaya M. Abdul Aziz (ed.), *”Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad Ke 21,* Jakarta: Yayasan Islam Abad 21, cet I.
- Yustina, Ida dan Sudrajat, Adjat (Penyt.), 2003, *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan : Didedikasikan Kepada Prof. Dr. H.R. Margono Slamet,* IPB Press : Bogor.

Agritexts Volume XL Edisi 1 Mei 2016

Zarkasyi, Imam dan Ahmad Sahal.
Wasiat, Pesan, Nasehat dan Harapan Pendiri Pondok Modern Gontor. Ponorogo: Pondok Modern Gontor.

Ziemek, Manfred. (September 1986). *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: Perhimpunan

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Cet. I.

Zubeidi.2007.*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I.